



## Pendidikan Inklusif di Papua: Tinjauan Literatur Sosial

Fredrik Sokoy<sup>1</sup>, Rif'iy Qomarrullah<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

Jl. Kamp Wolker Yabansai, Jayapura, Papua 99351

\*E-mail: qomarrifqi77@gmail.com

**Abstract :** *Inclusive education has become a strategic approach to addressing the challenges of unequal access and quality of education in Papua, particularly for children with special needs and other marginalized groups. This study aims to critically examine the development, challenges, and opportunities in implementing inclusive education in Papua through a social literature review. The method used is a literature study by analyzing various scholarly articles, policy reports, and official government documents published over the past two decades. The findings indicate that the implementation of inclusive education in Papua still faces numerous obstacles, including limited human resources, uneven educational infrastructure, and a lack of understanding among communities and stakeholders regarding the concept of inclusivity. Nevertheless, there are emerging local initiatives and government policies that begin to support the strengthening of inclusive education systems in the region. The implications of this study highlight the importance of collaboration between the government, communities, and educational institutions in creating an inclusive and socially just learning ecosystem in Papua.*

**Keywords:** *Inclusive Education, Social, Papua.*

**Abstrak :** Pendidikan inklusif menjadi salah satu pendekatan strategis dalam menjawab tantangan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Papua, khususnya bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus dan kelompok marjinal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis perkembangan, tantangan, dan peluang implementasi pendidikan inklusif di Papua melalui tinjauan pustaka sosial. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan dalam dua dekade terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Papua masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pendidikan yang tidak merata, serta minimnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terkait konsep inklusivitas. Namun demikian, terdapat inisiatif lokal dan kebijakan pemerintah yang mulai mendukung penguatan sistem pendidikan inklusif di wilayah ini. Implikasi dari kajian ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan sosial di Papua.

**Kata kunci:** Pendidikan Inklusif, Sosial, Papua.

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu yang dijamin secara konstitusional dan menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (Tintingon et al., 2023). Di Indonesia, prinsip keadilan sosial dalam pendidikan terus diperjuangkan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendidikan inklusif (Qomarrullah et al., 2023). Pendidikan inklusif menekankan pada pentingnya menyediakan lingkungan belajar yang setara, di mana setiap anak—termasuk anak dengan disabilitas dan kelompok rentan lainnya—mendapatkan akses pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Namun, implementasi pendekatan ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang kompleks (Qomarrullah et al., 2024).

Papua, sebagai salah satu provinsi dengan tingkat pembangunan manusia terendah di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam dunia pendidikan. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023, Papua menempati posisi terendah nasional dengan angka 60,62, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 74,39. Salah satu faktor penyumbang rendahnya IPM adalah rendahnya angka partisipasi sekolah dan tingginya angka putus sekolah, terutama di kalangan anak-anak dengan kebutuhan khusus dan kelompok marjinal. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan akses dan kualitas pendidikan yang signifikan di wilayah ini, yang menuntut pendekatan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti permasalahan pendidikan di Papua. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Qomarrullah et al. (2025) menunjukkan bahwa masih minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pendidikan inklusif menjadi kendala utama dalam penerapannya. Sementara itu, penelitian oleh Amri et al. (2021) menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang inklusif, namun dalam praktiknya masih banyak sekolah yang belum ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik di tingkat lokal menjadi isu utama yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam perspektif sosial dan literatur.

Secara teoritis, pendidikan inklusif berakar pada prinsip-prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan nondiskriminasi sebagaimana diteorikan oleh Booth dan Ainscow dalam *Index for Inclusion* (Khairuddin, 2020). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada integrasi fisik anak dengan kebutuhan khusus ke dalam sekolah umum, tetapi juga transformasi sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman kebutuhan semua peserta didik (Kasman, 2020). Dalam konteks Papua, pendekatan ini menjadi sangat penting untuk merespons realitas sosial yang ditandai oleh ketimpangan, kemiskinan struktural, dan keterbatasan infrastruktur pendidikan.

Namun, meskipun wacana pendidikan inklusif telah berkembang dalam lingkup nasional, kajian mendalam yang secara spesifik membahas implementasi pendidikan inklusif di Papua masih terbatas. Sebagian besar kajian lebih terfokus pada pendekatan kebijakan makro atau statistik kuantitatif, sementara aspek sosial-budaya, nilai lokal, dan narasi masyarakat lokal kurang diangkat. Padahal, untuk memahami tantangan dan peluang pendidikan inklusif di Papua secara utuh, pendekatan literatur sosial sangat dibutuhkan sebagai pijakan analisis yang lebih kontekstual.

Dalam konteks Papua, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari dinamika budaya sosial masyarakat yang sangat beragam. Papua memiliki lebih dari 250 kelompok etnis dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda, yang membentuk struktur sosial dan nilai-nilai lokal yang khas. Nilai-nilai kolektivitas, penghormatan terhadap alam, serta sistem relasi sosial yang berbasis komunitas menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Papua. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan inklusif di wilayah ini harus mempertimbangkan aspek kultural agar dapat diterima dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum, metode pengajaran, serta interaksi antara guru dan siswa perlu disesuaikan dengan konteks budaya lokal agar pendidikan tidak bersifat hegemonik atau memaksakan nilai-nilai luar yang tidak kontekstual. Integrasi budaya dalam pendidikan inklusif akan memperkuat rasa memiliki, memperkecil resistensi sosial, dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah serta berkeadilan.

Tulisan ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan social literature review yang menganalisis berbagai sumber pustaka secara kritis, termasuk hasil penelitian akademik, laporan kebijakan, dan dokumen program pendidikan yang relevan. Kajian ini berupaya membangun pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pendidikan inklusif dipraktikkan di Papua, tantangan apa saja yang dihadapi, serta strategi yang telah dan dapat diterapkan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil.

Tulisan ini terletak pada pendekatan sosial-kritis yang digunakan dalam menelaah praktik pendidikan inklusif di Papua. Tidak hanya menampilkan data dan fakta, kajian ini juga mencoba memahami dinamika sosial, relasi kekuasaan, serta hambatan struktural yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif. Pendekatan ini memberikan perspektif alternatif dari dominasi analisis kebijakan teknokratis yang sering kali tidak menyentuh akar persoalan pendidikan di wilayah terpinggirkan seperti Papua.

Maka dari itu untuk memberikan pemetaan kritis terhadap perkembangan dan tantangan implementasi pendidikan inklusif di Papua dengan menggunakan pendekatan literatur sosial. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan dan praktik terbaik yang dapat direkomendasikan bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan aktor pendidikan lainnya di Papua. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan dasar perumusan kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual dan berpihak pada kelompok rentan.

Secara teoritis, tulisan ini memperkaya literatur pendidikan inklusif di Indonesia dengan fokus pada konteks wilayah timur yang masih jarang dijadikan subjek kajian utama. Secara praktis, hasil kajian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun strategi implementasi pendidikan inklusif yang

lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial dan inklusi pendidikan di tanah Papua.

## **2. TINJAUAN LITERATUR**

Kajian tentang pendidikan inklusif telah berkembang luas dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap hak pendidikan bagi semua anak tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif secara umum diartikan sebagai pendekatan yang berupaya mengakomodasi semua anak, terlepas dari perbedaan latar belakang, kemampuan, dan kondisi sosial mereka, dalam satu sistem pendidikan yang sama (Wahid & Khouilita, 2023). Berbagai penelitian menyoroti pentingnya pendidikan inklusif sebagai strategi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memperluas akses pendidikan yang adil.

Di tingkat global, Hernández-Saca et al. (2023) menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya tentang penyediaan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi juga mencakup strategi sistemik untuk merespons keragaman siswa dalam konteks budaya, sosial, dan ekonomi. Hal ini menjadi relevan ketika membicarakan konteks Papua, di mana faktor-faktor seperti kemiskinan struktural, keterbatasan infrastruktur, dan perbedaan budaya menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pendidikan.

Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian telah mengidentifikasi hambatan implementasi pendidikan inklusif. Lastini et al. (2024) mencatat bahwa banyak sekolah di Indonesia belum memiliki pemahaman, kebijakan, dan sumber daya yang memadai untuk menerapkan prinsip inklusi. Sebagian besar guru belum dilatih secara khusus dalam pedagogi inklusif, dan masih terdapat stigma terhadap siswa dengan kebutuhan khusus maupun mereka yang berasal dari kelompok minoritas.

Penelitian yang lebih spesifik di Papua menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan kenyataan lokal. Alik (2024) menemukan bahwa pendidikan di Papua masih didominasi pendekatan homogen yang tidak mempertimbangkan konteks budaya dan bahasa lokal. Hal ini menyebabkan banyak anak mengalami kesulitan dalam proses belajar, terutama karena penggunaan bahasa pengantar yang tidak mereka kuasai. Atek dan Belolon (2024) juga menyoroti bahwa kurikulum yang tidak kontekstual dan kurangnya pelibatan komunitas lokal menjadi penyebab rendahnya efektivitas pendidikan inklusif di wilayah tersebut.

Sementara itu, Firdausyi (2024) dalam kajiannya menekankan pentingnya pelatihan dan penguatan kompetensi guru dalam membangun budaya inklusif di sekolah. Dalam wilayah dengan kompleksitas budaya dan keterbatasan fasilitas seperti Papua, peran guru menjadi

sentral dalam menjembatani kebutuhan siswa dengan realitas sistem pendidikan. Namun, fakta menunjukkan bahwa banyak guru di Papua masih menghadapi hambatan dalam mengakses pelatihan profesional secara berkelanjutan.

Di sisi lain, beberapa studi juga mengangkat pendekatan berbasis komunitas sebagai solusi potensial. Penelitian oleh Mustika et al. (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh adat dan orang tua dalam perencanaan pendidikan dapat memperkuat penerimaan terhadap kebijakan inklusif. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa.

Secara teoretis, pendekatan *Index for Inclusion* dari Booth dan Ainscow menjadi kerangka penting dalam membangun sistem pendidikan yang responsif terhadap keberagaman (Jauhari, 2017). Tiga dimensi utama—budaya inklusif, kebijakan inklusif, dan praktik inklusif—dapat dijadikan tolok ukur untuk menganalisis sejauh mana pendidikan inklusif di Papua telah diterapkan. Selain itu, teori sociokultural dari Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan konteks budaya lokal dalam proses belajar, yang sangat relevan bagi wilayah seperti Papua yang kaya akan identitas budaya (Syarif, 2020). Teori keadilan sosial dari Rawls juga menjadi fondasi filosofis bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang menjamin hak setiap individu, terutama kelompok rentan dan terpinggirkan, untuk mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan bermartabat (Damanhuri Fattah, 2023).

Dengan merujuk pada temuan-temuan empiris dan kerangka teori tersebut, tulisan ini berupaya untuk meninjau secara kritis dinamika implementasi pendidikan inklusif di Papua, serta mengidentifikasi tantangan dan potensi strategi berbasis sosial-budaya untuk mendorong sistem pendidikan yang lebih adil dan transformatif.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode literature review atau kajian pustaka yang bersifat eksploratif (Akbar et al., 2021; Sokoy et al., 2023). Tujuan dari metode ini adalah untuk mengkaji secara mendalam berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, laporan lembaga internasional, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pendidikan inklusif di Papua (Qomarrullah & Sokoy, 2024). Kajian dilakukan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika, tantangan, dan potensi pendidikan inklusif dalam konteks sosial-budaya wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Indonesia, khususnya Papua.

Data sekunder yang dikumpulkan meliputi artikel jurnal nasional dan internasional yang terbit antara tahun 2010 hingga 2024, buku akademik, laporan UNESCO, dokumen kebijakan

Kementerian Pendidikan, serta disertasi dan tesis yang membahas topik serupa. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis di basis data seperti *Google Scholar*, *Scopus*, dan Portal Garuda, dengan menggunakan kata kunci seperti “pendidikan inklusif di Papua,” “inklusi sosial dalam pendidikan,” dan “akses pendidikan 3T.”

Analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengidentifikasi pola, kategori, dan isu-isu kunci yang muncul dalam berbagai sumber (Murwati & Asroriyah, 2020). Proses analisis melibatkan tiga tahap: (1) Reduksi data, yakni pemilahan informasi relevan dari sumber yang terkumpul; (2) Penyajian data dalam bentuk uraian naratif dan tematik; dan (3) Penarikan kesimpulan serta interpretasi kritis terhadap implikasi sosial, budaya, dan kebijakan dari praktik pendidikan inklusif di Papua. Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber dan penilaian kritis terhadap kredibilitas literatur yang digunakan (Priya, 2021).

Metode ini dipilih karena mampu menjangkau beragam perspektif teoretis dan kontekstual, serta memberikan ruang untuk sintesis reflektif terhadap praktik pendidikan inklusif yang tidak dapat digali secara optimal melalui studi lapangan semata, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses geografis dan keamanan seperti Papua (Dihan & Hidayat, 2020; Itok Dwi Kurniawan, 2023). Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar konseptual dan praktis dalam merancang strategi inklusi pendidikan yang kontekstual dan berkeadilan di Papua.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan utama terkait pelaksanaan pendidikan inklusif di Papua yang dapat dikategorikan dalam beberapa tema besar, yaitu tantangan struktural, peran budaya lokal, kapasitas guru, dan strategi komunitas.

##### **Tantangan Struktural dalam Pendidikan Inklusif di Papua**

Salah satu tantangan mendasar dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Papua adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan yang merata dan layak. Banyak sekolah di wilayah pedalaman dan pegunungan Papua tidak memiliki gedung sekolah yang permanen, ruang kelas yang memadai, ataupun fasilitas sanitasi yang layak. Dalam beberapa kasus, proses belajar-mengajar masih dilakukan di rumah warga, gereja, atau bahkan di ruang terbuka, terutama ketika kondisi bangunan sekolah rusak akibat cuaca ekstrem atau bencana alam. Kondisi ini secara langsung memengaruhi kenyamanan dan efektivitas proses pembelajaran, khususnya bagi siswa dengan kebutuhan khusus yang membutuhkan ruang dan alat bantu tertentu.

Kondisi geografis Papua yang sangat luas, bergunung, dan sulit dijangkau menjadi tantangan tambahan yang memperparah keterisolasian sejumlah daerah (Uamang et al., 2018). Akses transportasi yang terbatas membuat distribusi buku, alat peraga, dan perangkat teknologi pendidikan tidak merata (Qomarrullah et al., 2022). Guru dan tenaga pendidik pun enggan ditempatkan di wilayah-wilayah yang terpencil karena kurangnya insentif, terbatasnya fasilitas pendukung kehidupan sehari-hari, serta minimnya jaminan keamanan (Wulandari & Thoif, 2024). Ketimpangan akses inilah yang membuat kualitas pendidikan antar wilayah di Papua menjadi tidak setara, sehingga pendidikan inklusif sulit diterapkan secara adil dan menyeluruh.

Oleh karenanya, literatur mengungkap bahwa kebijakan pendidikan inklusif yang dicanangkan secara nasional belum sepenuhnya responsif terhadap konteks sosial dan budaya lokal di Papua. Banyak kebijakan masih bersifat top-down tanpa mempertimbangkan kekhasan masyarakat adat, struktur sosial, serta norma-norma lokal. Misalnya, kurikulum yang bersifat seragam secara nasional tidak memberikan ruang fleksibel untuk mengakomodasi kearifan lokal, nilai-nilai budaya, maupun bahasa daerah yang dominan di masyarakat Papua. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak efektif diterapkan di lapangan dan justru menciptakan jurang antara konsep inklusif secara normatif dengan praktik nyata di tingkat lokal.

Selain itu, sistem pendataan siswa berkebutuhan khusus di Papua juga belum berjalan optimal. Banyak anak-anak dengan disabilitas tidak tercatat secara administratif atau bahkan tidak bersekolah karena stigma sosial yang masih kuat, minimnya sosialisasi kebijakan inklusif, serta ketiadaan layanan asesmen awal dan intervensi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya inklusi belum didukung oleh sistem manajemen pendidikan yang kuat dan adaptif. Kurangnya data valid ini pada akhirnya menyulitkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis kebutuhan riil siswa di daerah tersebut.

Mengatasi tantangan struktural ini membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Diperlukan kebijakan desentralisasi pendidikan yang memberi otonomi lebih besar kepada daerah untuk mengelola sistem pendidikan sesuai karakteristik wilayahnya. Investasi dalam infrastruktur pendidikan yang berkelanjutan, pelatihan guru di daerah terpencil, serta penggunaan teknologi berbasis komunitas lokal seperti radio pendidikan atau platform belajar *offline* dapat menjadi alternatif strategis untuk memperluas akses pendidikan inklusif di Papua. Pendekatan ini akan lebih relevan dan berdaya guna apabila dirancang dengan melibatkan suara dan partisipasi aktif masyarakat adat Papua sebagai subjek utama pendidikan.

## **Peran Budaya Lokal dan Bahasa dalam Pendidikan Inklusif**

Konteks budaya Papua yang sangat kompleks dan majemuk menjadi salah satu faktor kunci dalam pengembangan pendidikan inklusif yang efektif. Papua memiliki lebih dari 250 bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai kelompok etnolinguistik, yang menunjukkan tingginya keragaman budaya dan identitas lokal. Dalam banyak komunitas, bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai, tradisi, dan pengetahuan leluhur. Ketika sistem pendidikan formal mengabaikan keberadaan bahasa dan budaya lokal, siswa merasa terasing dari materi pembelajaran, yang berdampak negatif terhadap partisipasi dan hasil belajar mereka.

Penggunaan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar dalam pembelajaran sering kali menjadi kendala, khususnya bagi anak-anak usia dini yang belum mengenal bahasa nasional secara baik. Hal ini memperlebar kesenjangan pemahaman antara guru dan siswa serta menyebabkan rendahnya motivasi dan keterlibatan dalam proses belajar. Dalam konteks pendidikan inklusif, hambatan bahasa ini merupakan bentuk eksklusi terselubung yang mengabaikan kebutuhan linguistik siswa dari latar belakang minoritas. Penelitian oleh Judijanto & Al-Amin (2024) dan Hayati et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan bahasa ibu dalam tahap awal pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep dasar dan memperkuat rasa percaya diri siswa.

Lebih dari sekadar alat bantu komunikasi, bahasa daerah memiliki fungsi sosiokultural yang sangat kuat dalam membentuk identitas dan kohesi sosial siswa. Ketika pendidikan mampu mengintegrasikan bahasa dan budaya lokal ke dalam kurikulum, siswa merasa lebih dihargai dan terlibat secara emosional dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang menghormati budaya lokal juga dapat menciptakan lingkungan inklusif yang mengurangi diskriminasi dan meningkatkan penerimaan terhadap perbedaan. Selain itu, penguatan budaya lokal dalam pendidikan berpotensi menjaga keberlanjutan warisan budaya Papua di tengah arus globalisasi yang homogen.

Oleh karena itu, pendidikan inklusif di Papua harus dikembangkan dengan pendekatan multibahasa dan multikultural yang adaptif terhadap karakteristik lokal. Kurikulum perlu memberikan ruang untuk penggunaan bahasa daerah, terutama di jenjang pendidikan dasar, sambil secara bertahap mengenalkan bahasa Indonesia. Pelatihan guru dalam penguasaan bahasa lokal serta pengembangan materi ajar berbasis budaya juga sangat penting untuk mendukung pembelajaran yang kontekstual dan efektif. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya menjadi sarana pengajaran akademik, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial yang memperkuat identitas, solidaritas, dan kesetaraan di tengah keberagaman Papua.

## **Kapasitas dan Peran Guru dalam Pendidikan Inklusif**

Guru merupakan pilar utama dalam implementasi pendidikan inklusif, karena mereka yang secara langsung berinteraksi dan membentuk pengalaman belajar siswa di dalam kelas. Dalam konteks Papua, peran ini menjadi semakin krusial mengingat keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan kebutuhan peserta didik. Namun, literatur menunjukkan bahwa banyak guru belum memiliki kompetensi pedagogis yang memadai dalam menerapkan pendekatan inklusif, terutama dalam memahami dan mengakomodasi kebutuhan siswa dengan disabilitas, perbedaan bahasa, atau trauma sosial akibat konflik (Munawir et al., 2020; Yang, 2020).

Minimnya pelatihan formal tentang pendidikan inklusif menjadi salah satu akar permasalahan. Guru di Papua, terutama di wilayah pedalaman, sering kali tidak mendapatkan akses terhadap program pengembangan profesional berkelanjutan. Sebagian besar pelatihan guru masih bersifat umum dan tidak menjangkau aspek-aspek spesifik seperti strategi pembelajaran diferensiasi, penggunaan media bantu, asesmen berbasis kebutuhan individual, maupun penguatan pendekatan berbasis budaya lokal. Hal ini menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam mengelola kelas yang beragam secara efektif, dan pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran inklusif.

Selain itu, beban administratif dan jumlah siswa yang tinggi dalam satu kelas juga menyulitkan guru untuk memberikan perhatian yang cukup pada siswa dengan kebutuhan khusus. Ketidakseimbangan antara tuntutan kerja dan sumber daya yang tersedia menyebabkan guru mengalami kelelahan (*burnout*), stres, bahkan frustrasi dalam mengimplementasikan prinsip inklusi. Beberapa guru juga masih memiliki pandangan tradisional bahwa siswa dengan disabilitas lebih cocok berada di sekolah khusus, bukan di sekolah reguler, yang menandakan perlunya penguatan nilai-nilai inklusivitas dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan guru.

Tak hanya keterampilan teknis, kapasitas emosional dan sosial guru juga sangat penting dalam menciptakan iklim kelas yang suportif dan inklusif. Guru perlu memiliki empati, kesabaran, serta kemampuan komunikasi yang adaptif terhadap siswa dari berbagai latar belakang. Dalam masyarakat Papua yang sangat menjunjung nilai kekerabatan dan adat istiadat, guru juga diharapkan mampu membangun relasi positif dengan orang tua dan tokoh masyarakat, sehingga proses pendidikan dapat berlangsung selaras dengan norma-norma lokal. Ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi guru yang berasal dari luar Papua dan belum memiliki pemahaman mendalam tentang konteks budaya setempat.

Peran guru dalam pendidikan inklusif seharusnya tidak berdiri sendiri. Dukungan dari kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mendukung inklusi. Program mentoring antar guru, kolaborasi dengan tenaga profesional seperti psikolog atau terapis, serta forum komunitas belajar (*learning community*) dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat kapasitas guru di lapangan. Selain itu, perlu adanya kebijakan afirmatif yang mendukung guru-guru di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) agar mereka merasa dihargai dan memiliki motivasi yang tinggi dalam melayani semua siswa tanpa diskriminasi.

Ke depan, pembangunan pendidikan inklusif di Papua akan sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk memberdayakan guru sebagai agen perubahan. Investasi dalam pelatihan berbasis konteks lokal, pengembangan modul pembelajaran inklusif, serta pelibatan komunitas pendidikan dalam perumusan kebijakan akan menjadi faktor kunci. Dengan memperkuat kapasitas guru, maka sekolah-sekolah di Papua tidak hanya akan menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang aman bagi semua anak untuk tumbuh, berkembang, dan dihargai dalam keragaman mereka.

### **Strategi Berbasis Komunitas untuk Mendorong Pendidikan Inklusif**

Salah satu strategi penting dalam memperkuat pendidikan inklusif di Papua adalah melalui pendekatan berbasis komunitas. Keterlibatan aktif dari masyarakat lokal, termasuk tokoh adat, pemuka agama, dan orang tua, memiliki pengaruh besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kontekstual. Dalam banyak kasus, resistensi terhadap kebijakan pendidikan seringkali bukan karena penolakan terhadap inklusi, tetapi akibat ketidaksesuaian antara pendekatan pendidikan modern dengan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku. Oleh karena itu, melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dapat meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan dari inisiatif inklusif.

Partisipasi komunitas lokal juga berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara sekolah dan rumah (Yenduri et al., 2023). Dalam masyarakat Papua, keputusan pendidikan sering kali bersifat kolektif dan berbasis pada nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Ketika sekolah mampu membangun komunikasi yang harmonis dengan orang tua dan tokoh masyarakat, maka akan tercipta pemahaman bersama tentang pentingnya menghargai keberagaman dan mendukung setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Bahkan, dalam beberapa kasus, komunitas turut berkontribusi dalam menyediakan sumber daya alternatif, seperti bahan ajar lokal, tempat belajar, atau tenaga sukarelawan.

Temuan dari kajian Farikha & Chiar (2019) juga menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam kegiatan pembelajaran melalui dukungan komunitas mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama mereka yang berasal dari kelompok terpinggirkan. Hal ini sejalan dengan teori sosiokultural Vygotsky yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi secara optimal ketika didukung oleh interaksi sosial dalam konteks budaya yang bermakna. Dengan menjadikan komunitas sebagai mitra aktif, pendidikan inklusif dapat dirancang agar lebih sensitif terhadap kebutuhan lokal dan meminimalkan praktik pendidikan yang bersifat sentralistik atau homogen.

Strategi berbasis komunitas tidak hanya memperkuat dimensi kultural dalam pendidikan, tetapi juga membuka ruang inovasi dalam praktik pengajaran. Guru dapat bekerja sama dengan anggota komunitas untuk mengembangkan materi pembelajaran yang relevan, menyelenggarakan kegiatan belajar di luar kelas, atau menciptakan sistem mentoring antar siswa. Pendekatan ini memperluas makna inklusivitas, tidak hanya sebagai kebijakan yang menjamin akses, tetapi sebagai proses transformasi sosial yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang adil, adaptif, dan berkelanjutan di tanah Papua.

### **Implikasi Teoritis dan Praktis**

Temuan dalam kajian ini memiliki implikasi signifikan terhadap kerangka teoritis *Index for Inclusion*, yang menekankan bahwa pendidikan inklusif harus dibangun melalui tiga dimensi utama: budaya, kebijakan, dan praktik. Di Papua, dimensi budaya menjadi tantangan utama, di mana keberagaman etnis, bahasa, dan nilai-nilai lokal belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih sensitif terhadap latar belakang sosial budaya siswa. Pengakuan terhadap identitas budaya lokal bukan hanya memperkaya proses pembelajaran, tetapi juga memperkuat rasa inklusi sosial di kalangan siswa dari berbagai latar belakang (Manullang et al., 2025).

Dari sisi kebijakan, hasil kajian menunjukkan pentingnya desentralisasi kebijakan pendidikan yang memungkinkan adaptasi regulasi ke dalam konteks daerah. Banyak kebijakan nasional tentang pendidikan inklusif bersifat umum dan cenderung tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial-ekonomi khas Papua. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan yang berbasis pada data lokal serta melibatkan pemangku kepentingan daerah menjadi sangat krusial. Hal ini sejalan dengan prinsip contextual responsiveness dalam implementasi kebijakan inklusif yang ditekankan oleh Booth & Ainscow (Sulistiyarningsih & Handayani, 2018).

Secara praktis, temuan ini mempertegas pentingnya peningkatan kapasitas pendidik melalui pelatihan yang terfokus pada pendekatan pedagogi inklusif, manajemen kelas multikultural, serta penggunaan media ajar berbasis budaya lokal. Guru sebagai aktor utama dalam ruang kelas inklusif harus dibekali dengan kompetensi yang tidak hanya teknis, tetapi juga reflektif dan adaptif terhadap perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa. Pendampingan berkelanjutan dan forum berbagi praktik baik antar pendidik di Papua dapat menjadi strategi konkret dalam memperkuat praktik pendidikan inklusif secara sistemik.

Selain itu, bila ditinjau melalui lensa teori keadilan sosial John Rawls, pendidikan inklusif bukan hanya sebatas penyediaan akses fisik ke sekolah, tetapi juga tentang penciptaan kondisi yang adil dan setara dalam memperoleh kualitas pendidikan (Hariana, 2021). Prinsip *difference principle* dari Rawls menekankan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam konteks Papua, ini berarti bahwa intervensi kebijakan dan program harus difokuskan untuk memperkuat posisi kelompok-kelompok marjinal, termasuk anak-anak dari wilayah terpencil, penyandang disabilitas, dan kelompok adat. Dengan demikian, pendidikan inklusif menjadi sarana transformasi sosial yang menjamin keadilan substantif dan bukan sekadar formal.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kajian literatur ini mengungkap bahwa pendidikan inklusif di Papua masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, ketidakcocokan kebijakan nasional dengan konteks lokal, serta hambatan bahasa dan budaya. Selain itu, kapasitas guru dalam mengimplementasikan pembelajaran inklusif juga masih perlu ditingkatkan. Namun, keterlibatan komunitas lokal dan pengintegrasian nilai budaya setempat menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif di wilayah ini. Oleh karena itu, pendidikan inklusif di Papua perlu dikembangkan secara holistik dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan keadilan agar dapat menjangkau seluruh anak dengan efektif dan berkeadilan.

Untuk itu, disarankan agar pemerintah dan pelaku pendidikan di Papua mengembangkan kebijakan pendidikan inklusif yang kontekstual dan responsif terhadap keberagaman budaya serta bahasa daerah. Pelatihan dan pendampingan guru dalam metode pembelajaran inklusif perlu diperkuat, sementara peran serta komunitas lokal harus terus didorong agar program pendidikan lebih diterima dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai di daerah terpencil sangat penting untuk menunjang keberhasilan inklusi. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk menggali solusi praktis yang lebih tepat sasaran dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, K., Hamdi, H., Kamarudin, L., & Fahrudin, F. (2021). Manajemen POAC pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BDR di SMP Negeri 2 Praya Barat Daya). *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(1), 167. <https://doi.org/10.33394/jk.v7i1.2959>
- Alik, H. R. (2024). Analisis rendahnya pendidikan di pelosok Papua, Intan Jaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 12520–12529.
- Amri, U., Rifma, R., & Syahril, S. (2021). Konsistensi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2200–2205. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/778>
- Atek, L. G., & Belolon, H. K. (2024). Transformasi Pendidikan di Tanah Papua: Analisis Kebijakan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*, 11(2), 949–966.
- Damanhuri Fattah. (2023). Teori Keadilan Menurut John Rawl. *Jurnal TAPIS*, 9(2), 30–45.
- Dihan, F. N., & Hidayat, F. (2020). Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Disiplin Kerja Sebagai Variabel Intervening Di Waroeng Spesial Sambal Yogyakarta. *JBTI: Jurnal Bisnis Teori Dan Implementasi*, 11(1), 11–22. <https://doi.org/10.18196/bti.111126>
- Farikha, W., & Chiar, M. (2019). Partisipasi Masyarakat dan OrangTua dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 8(10), 1–14.
- Firdausyi, M. F. (2024). Mutu Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia. *Educatus: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 9–15. <https://doi.org/10.69914/educatus.v2i2.12>
- Hariana, K. (2021). Vygotsky's Sociocultural Theory Constructivism in Art Education. *EJ: Education Journal*, 2(1), 48–59.
- Hayati, R., Prima, W., & Jumiarti, D. (2024). Optimizing Differentiated Instruction in Sekolah Penggerak: A Case Study at the Elementary School Level. *EduHumaniora / Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 16(2), 165–176. <https://doi.org/10.17509/eh.v16i2.69344>
- Hernández-Saca, D. I., Voulgarides, C. K., & Etscheidt, S. L. (2023). A Critical Systematic Literature Review of Global Inclusive Education Using an Affective, Intersectional, Discursive, Emotive and Material Lens. *Education Sciences*, 13(12), 1–13. <https://doi.org/10.3390/educsci13121212>
- Itok Dwi Kurniawan. (2023). The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 37–40. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i2.22>
- Jauhari, M. N. (2017). Pengembangan Sekolah Inklusif dengan Menggunakan Instrumen Indeks for Inclusion. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya*, 13(23), 18–27.
- Judijanto, L., & Al-Amin. (2024). Challenges and Strategies in Implementing Inclusive Education: A Meta- Analysis of Global Perspectives. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 4(3), 991–1001.
- Kasman. (2020). Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan*, 8(2), 514–519.
- Khairuddin. (2020). Pendidikan Inklusif di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Tazkiya*, 9(1), 82–104.
- Lastini, F., Haryanti, S., Minsih, & Widyasari, C. (2024). Implementasi Strategi Pembelajaran Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 208–220.

- Manullang, T. D., Simanjuntak, F. M., Juwaira, A., Pardosi, M. V., Sembiring, E. A., Nahampun, D. Y., & Tansliova, L. (2025). Orang Tua: Kontributor Penting bagi Efektivitas Pendidikan Inklusi (Sebuah Riset Pustaka). *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 264–273.
- Munawir, Bilqhis, R. P., Mahmudah, & Mahmudah, R. (2020). Peran Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kesadaran tentang Pendidikan Inklusif. *Jurnal Basicedu*, 8(2), 1140–1148. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/971>
- Murwati, S. R., & Asroriyah, N. (2020). Studi Exploratif, Transformasi Pendidikan dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 1(3), 166–171. <https://siducat.org/index.php/jpt/article/view/122>
- Mustika, D., Afta, I., Aini, K., Auliya, N., & Febrianti, S. (2024). Studi Literatur: Peran Orang Tua dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11409–11415.
- Priya, A. (2021). Case Study Methodology of Qualitative Research: Key Attributes and Navigating the Conundrums in Its Application. *Sociological Bulletin*, 70(1), 94–110. <https://doi.org/10.1177/0038022920970318>
- Qomarrullah, R., Mujadi, M., N. Muhammad, R., Suratni, S., Wulandari S, L., & Sawir, M. (2023). Sport Edu-Fun Camp: Menyemai Cinta Untuk Lingkungan dan Kemanusiaan. *GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 54–63. <https://doi.org/10.51577/globalabdimas.v3i2.469>
- Qomarrullah, R., & Sokoy, F. (2024). The Role of Social Culture in the Physical Performance of Volleyball Players in Jayapura Regency. *Journal of Physical Education, Health and Sport*, 11(1), 15–23.
- Qomarrullah, R., Sokoy, F., Suratni, & Tammubua, M. H. (2024). Peran Masyarakat Adat dalam Pengembangan Pendidikan Berbasis Lingkungan Sosial. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i2.505>
- Qomarrullah, R., Suratni, S, L. W., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137.
- Qomarrullah, R., Wulandari S, L., Sawir, M., Suratni, S., & Muhammad, R. N. (2022). Leadership Management Training Berbasis Young Nationalism and Religiosity. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 236–243. <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i3.228>
- Sokoy, F., Qomarrullah, R., Lestari, W. S., Muhammad, R. N., & Sugiharto. (2023). Kanjuruhan Indonesia Football Tragedy (Culture, Management, Governance, and Justice). *International Journal of Human Movement and Sports Sciences*, 11(4), 753–761. <https://doi.org/10.13189/saj.2023.110408>
- Sulistiyarningsih, R., & Handayani, M. M. (2018). Analisis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Index For Inclusion. *Happiness*, 2(2), 67–81.
- Syarif, M. (2020). Penggunaan Teori Vygotsky Dalam Pembelajaran Materi Anggota Tubuh Pada Siswa RA Dayah Ilmi Lampoih Saka Kec. Peukan Baro Kabupaten Pidie. *Tarbiyatul - Aulad Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak*, 6(1), 27–42.
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>
- Umang, A., Indra, C., & Sasmito, C. (2018). Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Dalam Ketahanan Wilayah NKRI Di Pemerintah Kabupaten Mimika. *Jurnal Administrasi Publik*, 8, 47–57. <https://doi.org/10.33366/rfr.v8i1.925>
- Wahid, A., & Khoulita, I. (2023). Pendidikan Inklusif (Mewujudkan Keadilan, Kesetaraan dalam Lingkungan Multikultural). *ILJ: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan*

*Islam*), 1(3), 696–712.

[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)

Wulandari, L., & Thoif. (2024). Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Menjalankan Tugas: Tinjauan Kasus Supriyani di Konawe Selatan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)*, 5(1), 44–50.

Yang, Z. (2020). Literature Review: Inclusive Education in Early Childhood. *Journal of Contemporary Educational Research*, 4(5), 57–60.  
<https://doi.org/10.26689/jcer.v4i5.1252>

Yenduri, G., Kaluri, R., Singh, D., Lakshmana, K., Gadekallu, T. R., Mahmud, M., & Brown, D. J. (2023). From Assistive Technologies to Metaverse – Technologies in Inclusive Higher Education for Students with Specific Learning Difficulties : A Review. *ArXiv Preprint*, 5(2), 1–21.